

LAPORAN HASIL KULIAH KERJA LAPANG (KKL)

ANALISIS PROSES ADMINISTRASI TATA RUANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR

Lani Mulyawati¹, Oetje Subadja²

Email : lannywalters05@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda

Jl. Tol Jagorawi No.1, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720

Abstrak

Laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini menganalisis proses administrasi tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Dinas ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses administrasi tata ruang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan KKL berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi tata ruang telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya sumber daya yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi melalui digitalisasi dan pelatihan bagi staf. Pengalaman KKL ini memberikan wawasan praktis mengenai pengelolaan administrasi tata ruang serta pentingnya perencanaan yang terstruktur dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci: Administrasi Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Cianjur, Kuliah Kerja Lapang, Digitalisasi Arsip, Efisiensi Operasional.

Abstract

This Field Work Report (KKL) analyzes the spatial planning administration process at the Public Works and Spatial Planning Office of Cianjur Regency. This department plays a crucial role in supporting sustainable infrastructure development and spatial planning in the region. The study aims to understand how the spatial planning administration process is carried out, the challenges encountered, and the efforts made to overcome these challenges. The data collection methods used include observation, interviews, and documentation during the KKL activities. The findings indicate that while the spatial planning administration process has been functioning well, there are challenges such as complex bureaucracy and insufficient resources. Efforts to address these challenges include improving administrative efficiency through digitization and staff training. This KKL experience provides practical insights into the management of spatial planning administration and highlights the importance of structured planning in regional development.

Keywords: Spatial Planning Administration, Public Works Office, Cianjur Regency, Field Work, Archive Digitization, Operational Efficiency.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan tata ruang, Dinas PUTR berkontribusi langsung dalam memastikan pembangunan yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan latar belakang masalah berfokus pada peran penting Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dinas PUTR ini merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas di Dinas PUTR menjadi perhatian utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas di wilayah Cianjur, Permasalahan yang diangkat dalam laporan ini adalah bagaimana proses administrasi tata ruang dilakukan di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini adalah untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dalam konteks nyata di lapangan, memperdalam pemahaman tentang administrasi tata ruang, dan memahami kendala serta solusi yang terkait dengan proses administrasi tata ruang di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Dalam konteks ini, analisis terhadap proses administrasi tata ruang di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur menjadi sangat relevan. Proses administrasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, termasuk kendala dalam hal perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, serta upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai proses administrasi yang berlangsung, tantangan yang dihadapi,

serta solusi yang diterapkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, memperdalam pemahaman terhadap teori yang telah dipelajari, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi di Dinas PUTR Kabupaten Cianjur. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas proses administrasi tata ruang di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang proses administrasi tata ruang yang kompleks di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Dengan studi kasus, peneliti dapat menggali secara intensif fenomena yang terjadi dan membangun pemahaman yang komprehensif. Waktu dan Tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL) dilaksanakan selama satu bulan mulai tanggal 25 Juli 2024 – 23 Agustus 2024. Hari kerja dimulai Senin – Jum'at dan waktu kerja dimulai pukul 07.30 – 16.00 WIB. Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Instansi tersebut berlokasi di Jalan Adi Sucipta, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43212. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, metode penelitian dalam laporan ini termasuk dalam metode penelitian kualitatif. Metode ini ditandai dengan teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, tanpa fokus pada pengukuran numerik atau statistik, teknik pengumpulan data yang di merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya:

- a) Observasi, merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap permasalahan yang terjadi.
- b) Wawancara, merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari data kepada narasumber sesuai kebutuhan data peneliti.
- c) Dokumentasi, merupakan kegiatan mengambil gambar di tempat yang diteliti sesuai kebutuhan data.
- d) Studi pustaka, merupakan kegiatan pengambilan data dari buku, peraturan dan sumber internet.

Analisis data dalam laporan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan mencatat data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data di atas, terutama terkait dengan surat-surat administrasi umum seperti PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan KTR (Keterangan Tata Ruang), menganalisis kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teori-teori atau konsep-konsep yang relevan yang telah dipelajari, misalnya, teori administrasi dan pengelolaan tata ruang, evaluasi terhadap proses administrasi yang berjalan di Dinas PUTR, terutama dalam pengelolaan surat masuk dan arsip, serta proses pengambilan keputusan dalam kegiatan tata ruang dan menyusun laporan hasil analisis yang mencakup penemuan lapangan, analisis kesesuaian tata ruang, dan rekomendasi untuk perbaikan proses administrasi di Dinas PUTR

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama KKL di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur, berbagai kegiatan administrasi terkait tata ruang telah dilakukan, termasuk pendataan surat masuk, pengarsipan data, pembuatan surat dinas, serta pelaksanaan survei lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup rincian permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), analisis hasil survei, dan dokumen tata ruang lainnya.

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah dan jenis data yang diolah selama kegiatan KKL.

Tabel Hasil Jumlah dan Jenis Data yang Diolah

Jenis Data	Jumlah		Proses Pengolahan
	Kasus		
Surat Masuk Bidang Tata Ruang	120		Pendataan dan pengarsipan
Dokumen KKPR	45		Analisis dan verifikasi
Hasil Survei Lapangan	15		Pengolahan dan pelaporan
Nota Dinas	25		Pembuatan dan distribusi

Survei lapangan dilakukan di beberapa lokasi seperti Desa Benjot, Desa Cibulakan, dan Desa Karangtengah untuk memverifikasi kesesuaian. Gambar berikut menampilkan peta wilayah yang disurvei. Dari hasil survei ini, beberapa wilayah ditemukan gagal verifikasi dengan perencanaan ditentukan, terutama di Desa Karangtengah, yang menunjukkan adanya aktivitas pembangunan yang tidak memiliki izin tata ruang. KKPR berfungsi sebagai alat pengendalian pemanfaatan tanah yang melibatkan evaluasi terhadap penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Proses ini memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pembahasan

Rincian Pekerjaan (Job Description) Berikut merupakan rincian pekerjaan yang dilakukan selama 1 (satu) bulan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur, diantaranya :

1. Mendata surat masuk ke Bidang Tata Ruang Kegiatan ini adalah menerima surat masuk sesuai dengan keterangan disposisi yang tertera. Lalu surat tersebut diidentifikasi, dicatat, dan didata ke dalam

sistem. Informasi penting tersebut seperti tanggal penerimaan, nomor surat, pemohon, alamat, dan perihal surat. Setelah surat dicatat dan di data kedalam sistem, dan menyerahkan surat tersebut ke pihak yang dituju biasanya disampaikan kepada kepala bidang tata ruang. Kegiatan ini membantu memastikan alur komunikasi yang efisien dan pengelolaan dokumen yang rapi di Dinas PUPR terutama di bidang Tata Ruang.

2. Menginput dan mengarsipkan data KTR dan PKKPR Kegiatan ini adalah kegiatan menerima berkas-berkas terkait informasi permohonan KTR (Keterangan Tata Ruang) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dari pemohon atau instansi. Berkas tersebut diinput kedalam sistem basis data yang digunakan oleh dinas, penginputan data mencakup informasi seperti nama pemohon, lokasi dan luas lahan, tujuan pemanfaatan ruang, serta status persetujuan. Setelah didata, surat tersebut lalu diarsipkan sesuai dengan kategori yang termasuk dalam KTR ataupun PKKPR sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan.
3. Membuat Surat Dinas Dalam pembuatan surat dinas ini dilakukan ketika adanya kegiatan lapangan berupa survei ataupun kegiatan undangan diskusi. Proses ini dimulai dengan menerima instruksi atau permintaan pembuatan surat dari atasan atau divisi terkait. Dalam pembuatan surat dinas ini mencakup informasi mengenai tujuan perihal surat, isi pokok yang disampaikan, dan kepada siapa surat tersebut diteruskan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, langkah pertama adalah 24 menyusun draft surat dengan memperhatikan struktur yang benar, termasuk mengenai nomor surat, tanggal, lampiran, dan perihal. Isi surat ditulis dengan jelas dan menyampaikan informasi atau permintaan secara tepat dan ringkas. Setelah draft surat selesai, dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau informasi yang kurang. Jika sudah sesuai, surat tersebut disimpan di arsip atau dicetak lalu diberikan pada bagian terkait.

4. Mengikuti kegiatan rapat pertimbangan rekomendasi KKPR Kegiatan ini adalah kegiatan mengikuti rapat yang biasanya dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dinas, perwakilan pemerintah daerah, dan konsultan tata ruang. Pembahasan selama rapat berfokus pada evaluasi permohonan KKPR, kelengkapan dokumen, kesesuaian rencana dengan tata ruang yang ada, dan dampak lingkungan. Pencatatan notulen mengenai poin poin penting , rekomendasi dan Keputusan yang dihasilkan, kemudian notulen ini diserahkan kepada atasan atau divisi terkait untuk ditinjau dan diarsipkan.
5. Mengikuti kegiatan pelaksanaan survey lapangan Kegiatan ini adalah kegiatan survey lapangan, ada beberapa lokasi yang dilaksanakan survey selama magang yaitu Desa Benjot, Desa Cibulakan, dan Desa Karangtengah. Pelaksanaan survey dilakukan dengan mengamati kondisi fisik wilayah, mencatat penggunaan lahan, luas lahan dan mengevaluasi kesesuaian tata ruang yang ada dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan disertai bukti berupa dokumentasi dan pencatatan secara tertulis. Data survey kemudian dianalisis dan dijadikan sebuah laporan yang mencakup temuan lapangan, analisis kesesuaian tata ruang dan rekomendasi.
6. Membuat Nota Dinas Kegiatan ini merupakan sebuah surat atau dokumen resmi yang disampaikan ketika sudah melaksanakan rapat dinas, bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada pihak terkait lainnya.

Tabel Rekapitulasi Surat Masuk Bidang Tata Ruang

Tanggal	Jumlah Surat Masuk	Perihal Surat
25 Juli	5	Permohonan KTR Desa Benjot
26 Juli	4	Permohonan PKKPR Desa Karangtengah
29 Juli	6	Permohonan KTR dan PKKPR dari beberapa desa
2 Agustus	8	Evaluasi perencanaan tata ruang
7 Agustus	5	Surat undangan rapat dinas

12 Agustus	7	Permohonan KTR Desa Cibulakan
16 Agustus	10	Permohonan PKKPR untuk proyek perumahan

Pengendalian Pertanahan Melalui KKPR Persyaratan berkas permohonan yang terdiri atas surat permohonan Tata Ruang, fotocopy KTP/Surat identitas lainnya, fotocopy surat tanah, gambar situasi/letak tanah (titik koordinat tanah), nomor kontak pemohon. Adapun untuk prosedurnya yaitu pemohon mengajukan berkas permohonan ke pengadministrasi bidang tata ruang, pelaksanaan survei lapangan, penyusunan surat keterangan tata ruang berdasarkan pengolahan data hasil survei, dan pengambilan surat keterangan tata ruang oleh pemohon ke pengadministrasi bidang tata ruang, KKPR berperan dalam mengendalikan pertanahan melalui persyaratan yang menjadi acuan untuk menerima atau menolak permohonan KKPR. Jika permohonan KKPR ditolak, pemohon memiliki opsi untuk mengubah rencana pemanfaatan ruang atau memilih lokasi alternatif. Sebaliknya, jika permohonan disetujui, pemohon berhak melanjutkan proses perolehan tanah. Lokasi tanah yang diperoleh harus sesuai dengan area yang tercantum dalam KKPR dan mematuhi seluruh ketentuan teknis yang terkait dengan rencana pemanfaatan ruang. Setelah tanah diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Jika proses permohonan hak tidak dilanjutkan, tanah yang diperoleh berpotensi dikategorikan sebagai tanah terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. Aktivitas selama magang menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa yang ingin mendalami tema pengelolaan dan pendataan surat administrasi umum seperti PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan KTR (Keterangan Tata Ruang). Melalui magang ini, 31 mahasiswa dapat belajar secara langsung tentang proses-proses yang terlibat dalam administrasi umum di dinas publik, terutama terkait dengan perizinan dan pengaturan tata ruang. Kegiatan magang ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam bagaimana surat-surat administrasi umum diproses dan dikelola dalam sebuah dinas pemerintahan.

Mahasiswa bisa melihat secara langsung bagaimana formulir-formulir seperti PKKPR dan KTR diisi, diajukan, dievaluasi, dan disetujui. Hal ini membantu mereka untuk memahami prosedur prosedur yang harus diikuti dalam mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan ruang di suatu daerah. Selain itu, melalui magang ini mahasiswa dapat mengasah keterampilan praktis seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, baik dalam hal menyusun surat-menyurat resmi maupun berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak internal dinas maupun masyarakat umum yang mengajukan permohonan. Mahasiswa juga dapat mempelajari tentang pentingnya akurasi dan ketelitian dalam pengelolaan data, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi yang dikerjakan. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan jenis perijinan yang berfungsi menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Apabila permohonan KKPR ditolak, maka pemohon dapat mengubah rencana pemanfaatan ruang atau mengganti lokasi pemanfaatan ruang. Sebaliknya apabila permohonan KKPR disetujui, maka pemohon dapat melakukan kegiatan perolehan tanah. Aktivitas magang juga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang kebijakan publik terkait pengelolaan ruang dan tata letak. Dengan memahami peran dinas pemerintahan dalam mengatur pemanfaatan ruang, mahasiswa dapat lebih menghargai kompleksitas serta tantangan yang terlibat dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Selain itu, magang juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dinas tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga terkait dan komunitas lokal, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan pekerjaan umum dan tata ruang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Cianjur adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pengelolaan infrastruktur serta tata ruang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Sebagai salah satu dinas penting dalam

struktur pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Cianjur memiliki peran utama dalam memastikan pengembangan wilayah ini dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Cianjur dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Mereka berperan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan serta aspirasi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Cianjur. Persyaratan berkas administrasi permohonan yang terdiri atas surat permohonan Tata Ruang yang ditujukan kepada Dinas bersangkutan fotocopy KTP/Surat identitas lainnya, fotocopy surat tanah, gambar situasi/letak tanah (titik koordinat tanah), nomor kontak pemohon. Adapun untuk prosedurnya yaitu pemohon mengajukan berkas permohonan ke pengadministrasi bidang tata ruang, pelaksanaan survei lapangan, penyusunan surat keterangan tata ruang berdasarkan pengolahan data hasil survei, dan pengambilan surat keterangan tata ruang oleh pemohon ke pengadministrasi bidang tata ruang. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan jenis perijinan yang berfungsi menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Apabila permohonan KKPR ditolak, maka pemohon dapat mengubah rencana pemanfaatan ruang atau mengganti lokasi pemanfaatan ruang. Sebaliknya apabila permohonan KKPR disetujui, maka pemohon dapat melakukan kegiatan perolehan tanah 33 Secara keseluruhan, segala aktivitas magang di Dinas PUTR Cianjur merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa. Pengalaman ini menjembatani ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di dunia kerja, membantu kami mengembangkan kompetensi, dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan.

Saran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pendataan administrasi Dinas PUTR, disarankan agar menggunakan sistem digitalisasi yang lebih maju, dan sistem digitalisasi arsip tata ruang untuk mempermudah pencarian data yang dapat mempercepat proses pengelolaan data dan

mengurangi kesalahan manual. Selain itu, pelatihan rutin bagi staf mengenai penggunaan sistem baru dan prosedur administrasi sangat penting untuk memastikan pemahaman dan keterampilan yang memadai. Terakhir, penyusunan dan penerapan Prosedur Standar Operasional (SOP) yang jelas akan membantu dalam mencapai efisiensi dalam setiap proses administrasi, serta memudahkan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, D.F., Sutaryono & Wahyuni. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah. *Jurnal Tunas Agraria*, 6(1),12-29. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198>
- Ardani, M. N. (2021). Pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha guna mencegah tanah menjadi terlantar. *Gema Keadilan*, 8(1), 63-79. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395>
- Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 2(2), 88–103. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40>
- Diana, F., Idami, Z. & Alqarni, W. (2023). Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 09(01), 1-19. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23199>
- Djakaria, D. V. S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 253-293. <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2991>

- Djatmiati, T.S., Pudjiastutik, L., Indrawati, Sutrisno, D. (2012). Buku Ajar – Hukum Perizinan. Universitas Airlangga, Surabaya
- Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. FIG COM 7 Symposium On Innovative Technologies For Land Administration, 19 – 25 June 2005, Madison, Wisconsin, USA. https://www.researchgate.net/publication/228342504_Understanding_the_land_management_paradigm
- Enggarani, N. S. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. *Law and Justice*, 1(1), 16-29. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2702>
- Fajarini, R., Barus, B. & Panuju, D.R. (2015). Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Dan Prediksinya Untuk Tahun 2025 Serta Keterkaitannya Dengan Perencanaan Tata Ruang 2005-2025 Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Tanah Lingkungan*,17(1), 8-15. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jtanah/article/download/11463/8959>
- Firmansyah, M., Masrun & Yudha, I D.K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Elastisitas*, 3(2), 156-159. <https://doi.org/10.29303/ejep.v3i2.46>
- Hastri, E.D., Rachman, A.M.I., Shafarinda, R. (2022). Sanksi hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah permukiman melalui perizinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 64-80. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>
- Indra, S.R. & Indra, F.R.N. (2022). Pengelolaan dan pemanfaatan izin lokasi

dalam perolehan tanah yang diperlukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), <https://journalnusantara.com/index.php/JIM/article/view/609>

Lemmen, C., Van Oosterom, P., & Bennett, R. (2015). The land administration domain model. *Land Use Policy*, 49, 535-545. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715000174>

Nugraha, P., Mulyanto, B. & Munibah, K. (2021). Peran administrasi pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah Kabupaten Bogor. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, 5(1), 28-43. <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.28-43>

Mayasari, I. (2019). Evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan online single submission. *Jurnal Rechtsvinding*, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348>

Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. *Jurnal Veritas et Justitia*, 4(2), 252-273. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919>

Ramadhani, M.H., Effendy, M. & Qomariyanti, Y. (2019). Perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.109>

Riskanita, D. & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123-134. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>

- Sam, I.M., Setiowati, Riyadi, R. (2020). Analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai di Kelurahan Bintarore. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2), 122-139. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112>
- Sitorus, O. (2016). Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. *Jurnal Bhumi*, 2 (1), 1- 11. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29>
- Sukiptiyah, S., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Barus, B. (2022). Analisis Dampak Pola Penerapan Ruang Dalam Penempatan Lokasi Kegiatan Ekonomi Melalui Mekanisme Konversi Lahan Lahan Baku. *Jurnal Penelitian Sosial, Sains, Ekonomi, dan Manajemen*, 1(10), 1604-1620.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi mixed methods*. Alfabeta, Bandung
- Susanti, A.D. (2021). Kajian izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daratan bagi perizinan berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 179-191. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb>
- Susilo, B., Hatta, G.M., Badaruddin & Kadir, S. (2019). Evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan berbasis pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal EnviroScienteeae*, 15(2), 166-177. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/6946/5497>